



Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan

ISSN 2354-6147 EISSN 2476-9649

Tersedia online di: journal.stainkudus.ac.id/index.php/fikrah

DOI: 10.21043/fikrah.v5i2.2636

Media dan Kontribusinya dalam Internalisasi Nilai Pluralisme Agama di Indonesia

Alex Yusron Al-Mufti

Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara

goesxela@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan media dan kontribusinya dalam internalisasi nilai pluralisme agama di Indonesia. Metode penulisan deskriptif kualitatif, dengan pendekatan *library Research*, dengan temuan bahwa media massa dalam peranannya mempunyai dua kecenderungan, 1) berpotensi konflik, dan 2) menciptakan keharmonisan dan kesadaran pluralistik agama. media massa mempunyai peran untuk menginformasikan dan memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang realitas kemajemukan dan pluralisme agama di Indonesia. Media massa memegang peranan penting dalam menciptakan kondisi damai di masyarakat. Dengan adanya media massa seperti yang diberitakan melalui TV, radio, dan surat kabar, turut memberikan sumbangsih dalam internalisasi nilai-nilai pluralisme agama dengan alasan media massa memberikan informasi kepada masyarakat bahwa perbedaan di Indonesia adalah sebuah keniscayaan. Implikasinya masyarakat akan mampu mengenali, menerima dan menghargai perbedaan yang ada, baik perbedaan ras, bahasa, warna kulit, budaya dan agama sekalipun.

Kata Kunci : Internalisasi, media, pluralisme agama.

Abstract

This study aims to find out and to describe the media and its contribution in internalizing the value of religious pluralism in Indonesia. This article used a descriptive qualitative method, with the Research library approach. The finding showed that mass media in its role have two tendencies, 1) creating potential conflicts, and 2) religious pluralistic harmony and awareness. The mass media has a role to inform and educate the public about the reality of pluralism and plurality of religions in Indonesia. In plural society, mass media plays an important role in creating peaceful conditions. The contribution of the media should be directed to consider the public interest in creating peace conditions. The existence of mass media as reported through TV, radio and newspapers contributes to the internalization of the values of religious pluralism on the grounds that the mass media informs the public that the difference in Indonesia is a necessity. The implications of this are people will be able to recognize, accept and appreciate the differences that exist, whether differences in race, language, color, culture and religion.

Keywords: Internalization, media, religious plurality

Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara yang multiagama dan multietnis serta multibudaya. Hal tersebut dapat menjadi pemicu munculnya keributan yang disebabkan perbedaan cara pandang dan cara memahami pluralisme masyarakat. Bagi bangsa Indonesia, pluralisme atau kemajemukan telah ada sejak permulaan abad ke 20 ketika terjadi kebangkitan nasional, dan kemajemukan menjadi isu yang menonjol. Nama Indonesia hakikatnya menunjukkan kemajemukan berupa banyak entitas budaya yang berbeda satu sama lain, ditambah dengan kemajemukan yang disebabkan oleh perbedaan agama dan keyakinan yang cukup banyak. Hal ini menunjukkan bahwa pluralisme kemajemukan mengandung kebenaran bagi bangsa Indonesia. Akan tetapi, pluralisme tidak dapat dan tidak boleh berdiri sendiri kalau Indonesia ingin hidup sepanjang zaman. Dalam pluralism harus selalu ada paham kebersamaan tanpa paham kebersamaan, pluralisme dapat menimbulkan niat, gerak, dan usaha yang aneka ragam arahnya dan tujuannya (Ju'subaidi, 2016, hal. 181).

Kemajemukan bangsa Indonesia, juga disebabkan hampir semua agama-agama besar, yakni Islam, Kristen Protestan, Katholik, Hindu, Budha dan Konghucu hidup di negeri ini. Di sisi lain, masyarakat Indonesia juga terdiri dari beragam suku, etnis,

budaya dan bahasa. Bentuk negara kepulauan, juga menyebabkan penghayatan dan pengamalan keagamaan bangsa ini unik dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain (Rachman, 2001). Keberagaman dan perbedaan di Indonesia ini merupakan sunatullah yang tidak bisa dipungkiri, mulai dari perbedaan ras, etnik, bahasa, budaya dan agama sekalipun. Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa dalam sensus penduduk Indonesia tahun 2010 terdapat lebih dari 1.000 suku, tepatnya 1331 kategori suku. Sejumlah 1331 kategori itu merupakan kode untuk nama suku, suatu suku, nama subsuku, bahkan nama sub dari subsuku (Statistik, 2010).

Selain dikenal sebagai negara dengan keragaman etniknya, Indonesia yang penduduknya mencapai 260 juta jiwa di tahun 2017 ini menganut beberapa agama dan penghayat kepercayaan, keragaman agama tersebut dapat dilihat dalam Undang-undang No. 1/PNPS/1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama pasal 1 menyinggung soal "agama yang dianut", dalam penjelasannya dikatakan bahwa agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khong Cu (Confusius). Sesuai data statistik dapat dikatakan bahwa kemajemukan di Indonesia ini merupakan realitas empirik telah dikenal lama sebagai potensi berbangsa dan bernegara, dengan semboyan "Bhinneka tunggal ika". Meskipun berbeda-beda namun tetap satu jiwa. Begitu pula sejak Negara Republik Indonesia didirikan, bukan menjadi negara agama (teokrasi) dan juga bukan negara sekuler tetapi menjadi negara kesatuan dengan landasan Pancasila, yang di dalamnya terdiri dari multi etnik, suku, agama, bahasa, budaya dan lain sebagainya.

Perbedaan dan keragaman itu sendiri ada secara alami karena terbentuk oleh keyakinan (*beliefs*) dan pandangan hidup (*word view*). Keyakinan atau *beliefs* yang bersifat dogmatis-idiologis dibentuk oleh kepentingan-kepentingan untuk mempertahankan diri atau kelompok (*survival for the fittest*) (Abdullah, 2016, hal. 1). Kasus-kasus kekerasan merupakan fenomena memilukan yang terjadi akibat paham radikalisme agama. Sementara itu, radikalisme agama sendiri merupakan bagian kecil dari bentuk-bentuk radikalisme, setidaknya menurut M. Natsir (Kemenristekdikti) sebagaimana yang disampaikan dalam seminar nasional pada Mei 2017 di Aula Pascasarjana Undip Semarang menunjukkan bahwa radikalisme berwujud pada 9 (sembilan) jenis POK, di antaranya : 1) radikalisme gagasan, 2) radikal milisi, 3) radikal

separatis, 4) radikal premanisme, 5) radikal lainnya, 6) radikalisme masyarakat, 7) radikalisme agama, 8) radikalisme budaya, dan 9) radikal teroris. Sedangkan beberapa peristiwa terjadi di negeri ini seperti fitnah, saling hujat, menyebarkan kebencian karena perbedaan pandangan maupun sikap, membangun sentiman ras, suku, agama, dan perbedaan antar golongan. Kejadian-kejadian tersebut seakan lumrah dalam moda komunikasi dan interaksi masyarakat melalui medsos baik melalui Facebook, Twitter, Instagram, Youtube atau yang sejenisnya.

Melihat realitas tersebut sehingga timbul pertanyaan mengapa ujaran kebencian terjadi. Adakah yang salah dalam perjalanan perkembangan bangsa ini hingga realitas kemajemukan dan multi agama yang ada di Indonesia menjadi terciderai, yang seharusnya sebagai kekayaan dan perekat pemersatu bangsa dan pembawa rahmat bagi kita, justru sering menimbulkan pertikaian, permusuhan dan konflik yang berkepanjangan. Di sinilah letak garis lurus nya, yaitu media memainkan perannya dalam merubah wajah agama yang keras, yang dapat memunculkan konflik antar agama. Media massa merupakan bentuk jamak dari medium yang berarti tengah atau perantara. Media massa adalah instrumen teknologi komunikasi massa yakni “ *the industrialized production and multiple distribution of messages through technological devices*”. Konvergensi antara media massa, komputer, dan telekomunikasi berujung pada internet yakni “ *a network of networks that connects computers worldwide...* “ yang akhirnya melahirkan sebuah masyarakat informasi. Media massa mengarahkan sikap, perilaku dan kebiasaan hidup di tengah kehidupan modern dewasa ini sekaligus menjadi salah satu sumber pengetahuan atau sebagai panduan bagi masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas TI (Turow, 2009, hal. 17).

Dalam kontribusinya peran media massa tidak terbantahkan lagi, walaupun disisi lain keberadaan sebuah media massa tidak dapat dilepaskan dari tujuan komersial yang mengacu pada satu perusahaan media untuk meraih keuntungan, namun media massa memiliki keterkaitan yang erat dalam pembentukan mindset bahkan sikap seseorang dalam merespon suatu kasus atau kecenderungan, terlebih lagi kaitannya dalam sikap pluralisme bangsa. Melalui jalur inilah sehingga penulis menjadi tertarik dan mengangkatnya dengan judul Media dan Kontribusinya dalam Internalisasi Nilai Pluralisme agama di Indonesia.

Metode

Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif di mana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data menggunakan *library research*, analisis data bersifat induktif (kualitatif) dengan rumusan masalah bagaimana media kontribusi dalam internalisasi nilai pluralisme agama di Indonesia. Penelitian ini mempunyai tujuan mengetahui dan mendeskripsikan sejauh mana media dan kontribusinya dalam internalisasi nilai pluralisme agama di Indonesia.

Media dan Kontribusinya

Media massa merupakan suatu alat yang digunakan dalam menyampaikan pesan menggunakan alat komunikasi mekanis dari sumber pesan ke penerima pesan atau khalayak umum. Dalam pandangan Cangara (2002, hal. 134), yang termasuk bagian dari alat komunikasi ialah berbagai media massa yang ada di masyarakat seperti surat kabar, televisi, radio, hingga film. Media massa, yang dikenal oleh masyarakat dengan sebutan media, merupakan istilah yang digunakan sejak tahun 1920-an untuk mengidentifikasi berbagai media atau pers. Menurut Bungin (2013) media massa merupakan media komunikasi dan informasi yang melakukan penyebaran informasi secara massal dan dapat diakses oleh masyarakat secara massal pula. Dengan demikian media massa dapat menimbulkan perubahan sosial secara cepat dikarenakan mudahnya akses media massa, hal itu dapat pola hidup dan perilaku masyarakat yang mungkin agak menyimpang dari nilai sosial yang telah ada.

Media massa dapat berwujud pada beragam jenis, di antaranya media cetak, seperti koran, majalah, surat kabar dan tabloid. Media elektronik seperti radio, televisi, dan film, sementara yang terakhir berwujud pada *cybermedia*. Sebagai perantara penghubung, media massa berfungsi sebagai pemberi informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Pasal 3 Ayat (1). Sementara dalam pasal 4 ditambahkan bahwa media massa juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

Media massa seperti yang dikemukakan oleh Althusser dan Gramsci dalam Sobur (2009) merupakan alat yang digunakan untuk menyampaikan pendapat atau

aspirasi baik itu dari pihak masyarakat maupun dari pihak pemerintah atau negara. Dilihat dari segi fungsinya media massa berarti *to inform, to educate, to control and to entertain*. Media massa mempunyai dua kecenderungan besar yang bersifat “pengendalian”. Dalam literasi bahasa pengendalian merupakan sinonim dari kata pengawasan, yang bermakna: inspeksi, kontrol, pemeliharaan, pemeriksaan, pencegahan, penelitian, pengamatan, pengendalian, penilikan, penjagaan, penyeliaan, perlindungan, dan atau supervisi (Nasional, 2008, hal. 33). Secara logis, kecenderungan tersebut bisa mempengaruhi masyarakat, apakah itu bersifat provokatif, hasutan dan kebencian, maupun dapat menciptakan keadaan harmoni dan kondusif. Dengan kata lain, media massa dalam realisasinya mempunyai dua kecenderungan, yakni berpotensi dalam pemicu konflik dan berpotensi dalam menciptakan keharmonisan bagi kelompok masyarakat.

Pertama, media massa dan potensinya sebagai pemicu konflik. Melihat fungsinya yang mencakup dalam lima lini sekaligus, tentu tiada yang menyangka bahwa media massa mampu berpotensi dalam memicu konflik, karena dipercaya sebagai pusat informasi kepada masyarakat. Meskipun pada wilayah yang sama, media dapat menjadi wahana pendidikan kepada masyarakat, sebagai nilai kontrol dalam masyarakat dan sebagai media hiburan masyarakat, serta sebagai lembaga ekonomi yang dipercaya. Namun pada realitanya, fungsi-fungsi tersebut tidak selamanya berjalan lurus, karena pada saat tertentu media berperan sebagai sumber dari kemunculan konflik, yaitu media memainkan perannya untuk menyulut konflik masyarakat, dan bukan berarti media tidak hanya menjadi bagian dari sebuah konflik, atau berada dalam situasi konflik (Nuswantoro, 2013, hal. 506).

Dikatakan media berpotensi menimbulkan konflik dapat dijelaskan bahwa media sendiri menumbuhsururkan prasangka masyarakat terhadap suatu hal, biasanya hal tersebut yang bertalian erat dengan ras, etnik, budaya, golongan, maupun agama, atau kasus-kasus lain yang mengandung unsur suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Akibatnya, masyarakat menjadi terprovokasi, sehingga berpotensi meningkatkan prasangka negatif menjadi perlakuan diskriminatif bahkan berujung konflik terbuka.

Hal ini dapat dilihat melalui beberapa kasus, perwujudannya sebagaimana yang terjadi di Indonesia. Pasca terjadinya bom Bali, muncul prasangka negatif masyarakat Bali terhadap pendatang terutama mereka yang beragama Islam. Prasangka tersebut bertumbuh semakin subur bukan hanya karena satu per satu orang Bali membenci pendatang, tetapi karena media lokal terus-menerus menampilkan berita negatif mengenai Islam, sehingga mempengaruhi prasangka yang sudah ada sebelumnya. Salah satu media yang paling kelihatan adalah Bali Post (Burhanuddin, 2008, hal. 45). Bali Post bahkan turut mensponsori gerakan Ajeg Bali, yakni gerakan yang mengajak masyarakat Bali untuk berpikir, berkata, dan berbuat bagi kejegan Bali, khususnya di bidang agama dan budaya. Gerakan ini sebenarnya bertujuan baik, yakni menjaga adat dan budaya asli Bali dari pengaruh-pengaruh luar. Tetapi dalam pelaksanaannya Ajeg Bali kerap disalahgunakan sebagai dasar untuk mendiskriminasi pendatang (Nuswantoro, 2013, hal. 56).

Meskipun pada awalnya, stigma negatif atas Islam muncul setelah tragedi 11 September 2001, yaitu runtuhnya menara kembar yang ada di Amerika yang biasa disebut dengan WTC. Pasca kejadian tersebut, kaum muslim menjadi objek kecurigaan di tengah masyarakat Eropa, terlebih di Amerika Serikat (Taher, 2004, hal. 13). Mereka menuduh masyarakat Islam sengaja melakukan penyerangan terbuka untuk mencapai satu dunia Islam yang utuh di muka bumi ini. Prasangka dikonstruksikan oleh Amerika Serikat-saat pemerintahan George W. Bush-, kemudian disebarluaskan oleh media-media Barat. Akibatnya negara-negara Islam mengalami diskriminasi, termasuk Indonesia. Banyak di antara mereka yang dikenakan *travel warning*, sehingga kunjungan wisatawan menurun. Selain itu banyak kerja sama tingkat internasional yang ditinjau ulang karena prasangka ini. Bagaimana proyek-proyek pendidikan dan kemanusiaan yang tadinya berjalan lancar menjadi tersendat. Media barat telah memprovokasi masyarakat internasional untuk menaruh prasangka negatif terhadap Islam (Nuswantoro, 2013).

Melihat dua kasus besar di atas, *Pertama*, berimplikasi bahwa media massa mempunyai kecenderungan dalam menciptakan kebencian masyarakat, sehingga tidak dapat dipungkiri prasangka-prasangka negatif akan muncul dan perilaku diskriminatif atas suatu golongan tidak dapat terelakkan lagi. Sementara itu menurut Baowollo dalam

Ranggabumi Nuswantoro (2013) menyatakan setidaknya ada 4 konsep yang harus diperhatikan ketika membicarakan media dalam situasi konflik: (1) kepemilikan media; (2) *bandwagon effect*; (3) *infection*; (4) bahasa-bahasa media (Nuswantoro, 2013). Melalui hal ini berimplikasi ketika media massa mempunyai tenaga kerja yang handal, adanya kekuatan modal yang besar, dan informasi serta teknologi yang mutakhir, maka media massa akan mampu menciptakan kondisi dan berbuat banyak hal dalam masyarakat. Sementara itu dalam mendukung hal tersebut, hal yang paling dominan adalah hadirnya media *owner* itu sendiri, James Watson (1996) menyatakan bahwa siapa yang mengontrol proses komunikasi massa niscaya mendapat pengaruh besar dalam konteks sosial yang lebih luas. Sementara itu Das Freedman (2008, hal. 29) memberikan tesis menarik mengenai hal ini yaitu sistem media dibentuk oleh pemilik media dengan tujuan ekonomi politik tertentu, dengan nuansa-nuansa teknologi, ekonomi, dan sosial di dalamnya. Maka pemilik media memang memiliki kepentingan ekonomi politik dari media yang dimilikinya.

Kedua; Media massa berpotensi menciptakan keharmonisan. Sama halnya media massa dilihat dari potensi konflik maka akan terlahir kecurigaan-kecurigaan dalam pandangan masyarakat yang diakibatkan dari pengaruh atau infeksi dari apa yang telah diberitakan media, tidak jauh berbeda, masih menganulir dari kata pengaruh dan infeksi. Meskipun pada dasarnya, media mampu melahirkan atau menciptakan keharmonisan dari setiap apa yang diinformasikan kepada masyarakat luas, ini dikarenakan media massa mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam membangun mindset masyarakat karena perannya yang sangat potensial untuk mengangkat opini publik sekaligus sebagai wadah berdialog antar lapisan (Mas'udi, 2013, hal. 212).

Secara lebih spesifik, potensi positifnya media massa berperan dalam *pertama*, memberikan kontribusi dalam menyebarluaskan dan memperkuat kesepahaman antar warga; *kedua*, memberikan pemahaman terhadap adanya kemajemukan sehingga melahirkan penghargaan terhadap budaya lain; *ketiga*, sebagai ajang publik dalam mengaktualisasikan aspirasi yang beragam; *keempat*, sebagai alat kontrol publik masyarakat dalam mengendalikan seseorang, kelompok, golongan, atau lembaga dari perbuatan sewenang-wenang; *kelima*, meningkatkan kesadaran terhadap persoalan sosial, politik, dan lain-lain di lingkungannya. Kedua kecenderungan media massa

diibaratkan seperti dua sisi mata uang koin yang tidak dapat terpisahkan, pertama berpotensi konflik sementara pada sisi yang lain mampu menciptakan keharmonisan. Kedua kecenderungan tersebut di atas dilatarbelakangi dari banyak aspek dan kepentingan, salah satunya adalah terkait dengan bahasa penyampaian.

Bahasa sendiri merupakan alat pokok media dalam menyampaikan informasi kepada publik. Dengan bahasa yang sederhana, bahasa adalah perangkat utama media dalam melakukan konstruksi realitas. Bahasa merupakan alat konseptualisasi dan alat narasi. Begitu pentingnya bahasa, maka tak ada berita, cerita, ataupun ilmu pengetahuan tanpa ada bahasa. Selanjutnya, penggunaan bahasa (simbol) tertentu menentukan format narasi (makna) tertentu (Agus, Sudiby, Hamad, & Qodari, 2001, hal. 78). Ini artinya bahasa mampu mengarahkan *mindset* masyarakat tentang bagaimana mereka memandang suatu kasus, apakah realitas yang diinformasikan oleh media massa berkencenderungan intim, dingin, sikap benci, atau justru bahagia. Simbol-simbol yang disampaikan melalui media merupakan satu hal yang menarik dan terkadang dijadikan sebagai bahasa baku dari berbagai gagasan dan nilai-nilai yang diterapkan era ini. Budaya media sangat berpotensi dalam perubahan yang sangat signifikan pada aspek-aspek sosial-budaya dan juga agama, meskipun kesakralan agama masih dapat dijaga dengan baik.

Agama merupakan salah satu domain yang sangat penting dalam kehidupan manusia sehari-hari. Hubungan agama dengan media saat ini menjadi perbincangan seluruh khalayak, meskipun keduanya tetap dianggap sebagai domain yang terpisah. Agama dilahirkan dan dibentuk masyarakat berdasarkan keyakinan mereka, sedangkan media sering dipandang sebagai instrumen dalam menyampaikan substansi agama kepada audiens (Fakhruroji, 2017, hal. 42). Melalui media inilah, substansi agama akan diberikan penafsiran oleh para khalayak dengan baik atau justru sebaliknya. Penonton dalam memaknai pesan melalui media tersebut, tidak terlepas dengan retorika yang digunakan para penyampai pesan. Sebagaimana yang disampaikan Emile Durkheim (1995) bahwa agama sebagai salah satu fakta sosial yang memiliki kekuatan tertentu untuk mempengaruhi dan memaksa seseorang dalam sebuah masyarakat. Nilai-nilai dalam agama menjadi aturan yang disepakati bersama.

Pluralisme Agama

Agama hadir di bumi ini sebagai petunjuk bagi penciptaan kehidupan yang penuh keteraturan dan keharmonisan. Namun, kehadiran agama tidak tampak dalam wajah yang seragam layaknya ketidakseragaman manusia itu sendiri. Hal ini, sebenarnya berdampak positif bagi upaya menciptakan keteraturan kosmik, sebagaimana Tuhan menghendaki keragaman (pluralitas) itu sebagai sunnatullah. Permasalahannya adalah bahwa tidak semua komunitas umat beragama memiliki kesadaran untuk mengambil dan mengembangkan sisi positif-konstruktif dari keragaman tersebut. Sebagian kelompok menganggap kelompok lain yang berbeda sebagai musuh yang harus dihindari dan dinafikan eksistensinya. Tetapi juga terdapat komunitas yang menganggap kelompok lain sebagai partner dan memiliki eksistensi yang harus dihargai sebagaimana ia menghargai diri dan agamanya. Hal ini, karena menurut kelompok yang disebut terakhir, beragama (*hifdz ad-din*) merupakan salah satu dari lima hak dasar kemanusiaan (*adh-dharuriyat al-khamsah*) yang harus dijunjung tinggi oleh setiap orang (Sumbulah & Nurjanah, 2013).

Secara historis, apresiasi terhadap pluralisme agama ditunjukkan oleh Rasulullah ketika beliau menjadi pemimpin agama sekaligus pemimpin politik di Madinah. Kelompok Yahudi, Nasrani dan kelompok kebatinan, tidak dipaksa untuk masuk Islam. Mereka mendapatkan perlakuan yang sama, dengan hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya. Teori-teori keberagamaan dalam konteks masyarakat plural, terbagi dalam tiga kategori yang memiliki konsekuensi tersendiri bagi kehidupan keberagamaan. Teori tersebut adalah teori eksklusif, inklusif dan paralelis-pluralis. Sikap keberagamaan eksklusif, akan menjadi potensi destruktif bagi penciptaan keharmonisan hidup karena ia memicu konflik, ketegangan dan bahkan perpecahan antarumat beragama. Sedangkan sikap keberagamaan inklusif dan pluralis, merupakan potensi konstruktif bagi upaya mewujudkan keharmonisan dalam konteks masyarakat plural yang nir kekerasan (Sumbulah & Nurjanah, 2013).

Secara fenomenologis, istilah pluralisme beragama (*religious pluralism*) menunjukkan pada fakta, bahwa sejarah agama-agama menampilkan suatu pluralisme tradisi dan berbagai varian masing-masing tradisi. Sedangkan, secara filosofis istilah

pluralisme beragama menunjukkan pada suatu teori partikular tentang hubungan antara berbagai tradisi itu. Teori itu berkaitan dengan hubungan antar berbagai agama besar dunia yang menampakkan berbagai konsepsi, persepsi, dan respon tentang ultim yang satu, realitas ketuhanan yang penuh dengan misteri. Teori hubungan antar agama itu, paling tidak didekati melalui dua bentuk utama, eksklusivisme dan inklusivisme (Eliade, 1987, hal. 331).

Dua bentuk di atas tidak terlepas dari perbedaan dalam memahami konsep pluralisme itu sendiri, ada yang menolak dan yang menerima, sebagaimana yang disampaikan Ghazali (2009, hal. 19–23) *Pertama*, golongan yang menolak pluralisme agama, secara teologis kelompok ini beranggapan bahwa hanya agama mereka yang paling benar dan otentik dari Tuhan, sedangkan agama lain dianggap sebagai konstruksi manusia, atau mungkin sama-sama berasal dari Tuhan, hanya saja ada upaya perombakan atau pemalsuan dari umatnya sendiri. *Kedua*, kelompok yang menerima pluralisme agama sebuah kenyataan yang tidak dapat terhindarkan. Kelompok ini berpandangan bahwa agama semua Nabi adalah satu, mereka beralasan, bahwa mereka menganut pandangan tentang adanya titik-titik persamaan sebagai benang merah yang menyambungkan pada ketentuan doktrinal yang dibawa para Nabi. Pluralisme adalah sikap toleransi untuk menahan diri agar potensi konflik dapat ditekan, dan Pluralisme sesungguhnya tidak semata-mata menunjuk pada kenyataan tentang adanya kemajemukan, namun adanya keterlibatan aktif terhadap kenyataan kemajemukan tersebut. Bahwa tiap pemeluk agama dituntut bukan saja mengakui keberadaan dan hak agama lain, tetapi terlibat dalam usaha memahami perbedaan dan persamaan guna tercapainya kerukunan dalam Bhineka Tunggal Ika (Shihab, 1999, hal. 41).

Makna pluralisme seperti itu, terungkap dalam al-Quran QS. al-Baqarah 251: *“Seandainya Allah tidak mengimbangi segolongan manusia dengan segolongan yang lain, maka pastilah bumi hancur; namun Allah mempunyai kemurahan yang melimpah kepada seluruh alam”*. Suatu penegasan, bahwa Allah menciptakan mekanisme pengawasan dan pengimbangan antara sesama manusia guna memelihara keutuhan bumi, dan merupakan salah satu wujud kemurahan Tuhan yang melimpah kepada umat manusia (Rachman, 2001). Dengan demikian, pluralisme bisa muncul pada masyarakat di manapun ia berada. Ia selalu mengikuti perkembangan masyarakat yang semakin

cerdas dan tidak ingin dibatasi oleh sekat-sekat sektarianisme. Pluralisme harus dimaknai sebagai konsekuensi logis dari keadilan Ilahi – bahwa keyakinan seseorang tidak dapat diklaim benar dan salah tanpa mengetahui dan memahami terlebih dahulu latar belakang pembentukannya, seperti lingkungan sosial budaya, referensi atau informasi yang diterima, tingkat hubungan komunikasi, dan klaim-klaim kebenaran yang dibawa dengan kendaraan ekonomi-politik dan kemudian direkayasa sedemikian rupa demi kepentingan sesaat, tidak akan diterima oleh seluruh komunitas manusia manapun. Sebaliknya, pluralisme tidak dapat dipahami hanya dengan mengatakan bahwa masyarakat kita majemuk, beraneka ragam, terdiri dari berbagai suku dan agama, yang justru hanya menggambarkan kesan fragmentasi, bukan pluralisme. Demikian juga, pluralisme tidak boleh dipahami sekadar sebagai “kebaikan negatif” (*negative good*), hanya ditilik dari kegunaannya untuk menyingkirkan fanatisme. Tetapi, pluralisme harus dipahami sebagai pertalian sejati kebhinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban. Bahkan, pluralisme adalah juga suatu keharusan bagi keselamatan umat manusia, antara lain melalui mekanisme pengawasan dan pengimbangan yang dihasilkannya (Rachman, 2001).

Kemajemukan secara historis-sosiologis adalah fenomena dan kenyataan yang tidak bisa dihindari. Kemajemukan atau pluralitas umat manusia adalah kenyataan yang telah menjadi kehendak Tuhan. Sesuai dengan sunatullah, semua yang terdapat di dunia dan sengaja diciptakan dengan penuh keragaman. Di samping itu, al-Quran surat al-Maidah 48 memberi penegasan tentang kemajemukan dalam pandangan dan cara hidup antara manusia yang tidak perlu digusarkan, dan hendaknya dipakai sebagai pangkal tolak berlomba-lomba menuju kebaikan, dan bahwa Tuhanlah yang akan menerangkan mengapa manusia berbeda-beda, nanti ketika kembali kepadanya (Madjid, 1995, hal. 46). Dewasa ini, diperlukan kesadaran akan sifat dan hakikat “pluralistik” dan “lintas budaya”. Disebut pluralistik, karena tidak ada lagi satu budaya, ideologi, maupun agama yang dapat mengklaim sebagai satu-satunya sistem yang unik dan terbaik dalam pengertian absolut. Disebut lintas budaya, karena komunitas manusia tidak lagi hidup dalam sekat-sekat, sehingga setiap persoalan manusia saat ini yang tidak dilihat dalam parameter kemajemukan budaya adalah persoalan yang secara metodologis salah letak .

Berdasarkan fakta empiris-historis, keragaman beragama tidak mungkin bisa dihindari. Inilah yang diingatkan oleh Nurcholish Madjid, bahwa sistem nilai plural adalah sebuah aturan Tuhan (*sunatullah*) yang tidak mungkin berubah, diubah, dilawan, dan diingkari. Barang siapa yang mencoba mengingkari hukum kemajemukan budaya, maka akan timbul fenomena pergolakan yang tidak berkesudahan (Madjid, 1995). Demikian juga pandangan Rasjidi yang mengakui bahwa dalam kenyataan sejarah masyarakat adalah *multi-complex* yang mengandung *religious pluralism*, bermacam-macam agama. Hal ini adalah realitas, karena itu mau tidak mau kita harus menyesuaikan diri, dengan mengakui adanya *religious pluralism* dalam masyarakat Indonesia (Rasjidi, 2017, hal. 35). Dapat dikatakan bahwa memahami pluraritas agama dan budaya merupakan bagian dari cara memahami agama secara kontekstual. Memahami agama, pada dasarnya memahami juga kebudayaan masyarakat secara menyeluruh. Dan jika agama dipahami secara integral dengan kondisi sosial kulturalnya, pada saat itu pula akan tampak dengan sendirinya mana aspek budaya yang selaras dengan misi agama dan mana yang tidak.

Dengan kenyataan, bahwa keberagaman masyarakat Indonesia adalah pluralistis dan merupakan kenyataan yang tidak bisa dihindari, maka masalah ini diakui dalam konstitusi dan telah ditegaskan adanya jaminan untuk masing-masing pemeluk agama dalam melaksanakan ajaran sesuai dengan keyakinan masing-masing. Oleh karena itu, kekayaan keragaman ini bila dikelola dengan baik dan positif, maka akan menjadi modal besar bagi bangsa Indonesia. Namun bisa juga menjadi bencana yang mengandung potensi konflik. Sebagai realitas sosial, pluralisme agama ini tidak jarang menjadi problem, di mana agama di satu sisi dianggap sebagai hak pribadi yang otonom, namun di sisi lain hak ini memiliki implikasi sosial yang kompleks dalam kehidupan masyarakat. Masing-masing penganut agama meyakini bahwa ajaran dan nilai-nilai yang dianutnya yang paling benar, inilah yang harus diwartakan secara profesional dan proporsional dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, dikarenakan dalam kontek ini, agama sering kali menjadi potensi konflik dalam kehidupan beragama .

Dalam kontek kekinian, pluralisme merupakan satu dari tiga bagian tipologi sikap keberagaman dalam perspektif teologis, di samping eksklusivisme dan

inklusivisme. Seorang pemeluk agama yang bersifat eksklusif, memandang bahwa agamanyalah yang benar dan agama lain adalah sesat dan salah. Penganut agama yang bersifat inklusif, memandang bahwa keselamatan bukan monopoli agamanya. Penganut agama lain, yang secara implisit berbuat benar menurut agamanya, juga dinilai akan mendapatkan keselamatan. Adapun penganut teologi pluralis, berpandangan bahwa semua agama benar dan sama. Oleh karena itu, orang yang bersifat pluralis berpandangan bahwa tidak seharusnya umat beragama bersikap eksklusif dengan serangkaian klaim kebenaran (*truth claim*) dan keselamatan yang dialamatkan khusus menjadi atribut bagi mereka (Rachman, 2001).

Bukan saja hanya keragaman dalam beragama yang berpeluang memunculkan konflik, tetapi juga bisa terjadi karena keragaman etnis, budaya dan ideologi. Perbedaan budaya menjadi sebuah konduksi dalam hubungan interpersonal. Misalnya, ada yang mengangguk-anggukkan kepala atau bilang “uh”, tepuk tangan ataupun mengedipkan mata ketika mengungkapkan perhatiannya ketika diajak bicara atau mendengarkan pidato. Di kalangan psikolog, perbedaan budaya menunjukkan perbedaan intelegensi masyarakat. Masyarakat Sunda bercirikan ramah, masyarakat Bali lemah gemulai, dan lain-lain. Jika masyarakat atau seseorang memiliki kemampuan menguasai hal itu maka merupakan ciri dari tingkat intelegensinya. Sementara, manipulasi dan rekayasa kata dan angka menjadi penting dalam masyarakat Barat, maka keahlian dalam memiliki kemampuan ini menunjukkan kepada kemampuan intelegensinya (El Ma'hady, 2008). Disinilah perlunya membangun kesadaran bersama akan penghormatan terhadap keragaman identitas sosial termasuk identitas dan ekspresi keberagamaan. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya pengetahuan dan pemahaman tentang budaya yang beragam itu supaya tidak terjadi fragmentasi kelompok, ketersinggungan, kesalahpahaman, dan konflik-konflik horizontal. Geertz dalam Prisma (1996) menyatakan bahwa pluralitas horizontal di suatu masyarakat memiliki potensi konflik yang cukup besar dan dapat mengakibatkan terganggunya keutuhan tatanan sebuah Negara.

Dalam menyikapi keragaman budaya itu, sedikitnya ada tiga sudut pandang yang berbeda dan bahkan bisa memunculkan konflik, yaitu: 1) pandangan primordialis, di mana identitas asal sangat kental, baik itu agama, suku, adat, dll; 2) pandangan

instrumentalis, di mana keragaman budaya dan identitas dijadikan alat untuk mencapai tujuan, baik materil maupun nonmateril. Pandangan ini sering digunakan oleh para politisi misalnya ketika meneriakkan Islam, adalah dengan maksud semua umat Islam membackupnya untuk kepentingan politiknya; dan 3) konstruktivis, yaitu keragaman budaya dan identitas dibentuk sebagai jaringan pergaulan sosial (El Ma'hady, 2008). Bagi mereka, persamaan adalah anugrah sedangkan perbedaan adalah berkah. Tampaknya, yang ketiga ini terbuka ruang wacana untuk multikulturalisme dan menerima pluralisme beragama dalam membangun toleransi, egaliterian, persamaan, dan lain-lain yang bersikap inklusif.

Mewujudkan persamaan bukan hal yang mudah, meski secara teoritis sudah dipahami dengan baik. Oleh karena itu penting sekali untuk melakukan dialog antarumat beragama, sebagaimana yang disampaikan oleh Abdullah (2015) dengan melalui: *Pertama*, proses saling mengenal (*at-taaruf*), seringkali terjadi di masyarakat kita terjadi konflik dalam hal yang sepele namun menjadi permasalahan yang besar, hal ini disebabkan kekakuan dalam memahami ajaran agama, oleh karena itu dengan proses mengenal ini diharapkan adanya rasa segan antara satu dan lainnya. *Kedua*, saling memahami (*at-tafahum*), setelah proses mengenal maka dilanjutkan dengan proses memahami orang lain secara langsung tanpa melalui perantara. Memang saling memahami bahwa masing-masing agama, baik yang menyangkut doktrin, ritual, sistem moral, kepemimpinan, sistem sosial adalah berbeda, unik dan tentunya pasti ada. Adanya *distinctive values* dalam masing-masing agama akan mengantarkan sikap *agree in disagreement* secara teologis. Namun hal ini juga perlu didukung dengan sikap yang lainnya yaitu dengan *mutual understanding* (saling memahami).

Ketiga, saling mengasihi (*at-tarahum*), saling mengasihi di sini tidak harus terbatas hanya pada hubungan kekerabatan atau hanya satu iman. Namun jalinan kasih sayang itu bersifat antar ras, etnis, suku, kelompok, agama dan kepercayaan yang diyakini, sebagaimana dalam sebuah Hadis disebutkan: "*man lam yarham an-nas lam yurhamillah*" (barang siapa belum dapat mencintai sesama manusia, dia tidak akan dapat mencintai Tuhan). *Keempat*, saling bersinergi membangun solidaritas (*at-tadhamun*). Hal ini merupakan kunci dalam menegakkan perdamaian sejati. Membangun solidaritas tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, harus didasari dengan moralitas, saling engenal, saling memahami, saling mengasihi dan mempunyai

konsep membangun solidaritas antarumat beragama yang cukup tinggi. *Kelima*, hidup berdampingan secara damai tanpa konflik (*at-ta'ayus as-silmi*). Akumulasi dan tergabungnya sifat-sifat yang ada pada masyarakat majemuk secara etnis, ras dan agama hendaknya dikelola dengan baik, karena jika perbedaan di atas selalu dijadikan masalah maka akan menjadi sensitif yang akan berujung pada konflik. Hidup berdampingan dengan latar belakang yang beragam, satu hal yang diharapkan yaitu saling memahami dengan baik tanpa menyinggung satu dengan lainnya, dan hal ini merupakan modal sosial dan kultural yang ada di Nusantara.

Kontribusi Media dalam Internalisasi Nilai Pluralisme Agama di Indonesia.

Kemajemukan dan perbedaan di Indonesia ini merupakan sunatullah yang tidak bisa dipungkiri, mulai dari kemajemukan dan perbedaan ras, etnik, bahasa, budaya dan multi agama sekalipun. Agama-agama besar dunia tumbuh dan berkembang di Nusantara ini, seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khonghucu (Asyri, 2010, hal. 1). Selain itu, kemajemukan agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia dipandang sebagai hazanah sekaligus kekuatan bangsa. Karena agama dianggap satu kesatuan dari sistem kepercayaan yang kuat. Dalam konteks ini, faktor kerukunan umat beragama menjadi perlu untuk diaksentuasikan, bahkan upaya pemeliharaan keharmonisan tersebut menjadi mutlak diperlukan. Namun yang menjadi urgen adalah bagaimana realitas empirik tentang hazanah dan kekuatan bangsa ini mampu diketahui bahkan menjadi terimplementasi dalam pribadi masyarakat Indonesia secara menyeluruh, pasalnya informasi tersebut masih dalam tataran diplomatis oleh para pengkaji agama dan para akademisi saja yang tertuang dalam kegiatan diklat, workshop, diskusi, seminar, atau berliterasi secara mandiri, sementara itu masih sangat jarang sekali masyarakat luas mampu mengakses informasi tentang realitas kemajemukan bangsanya sendiri secara mendetail.

Realitas tersebut sangat penting untuk diketahui, terlebih kaitannya dengan kepercayaan atau agama, karena dengan mengetahui realitas pluralistik tersebut masyarakat Indonesia menjadi paham, dan maklum terhadap keadaan bangsanya, serta menjadi referensi dalam pengambilan sikap, apakah masyarakat harus berperilaku

skriptualis, radikal atau saling toleran. Sesuai dengan kebutuhan ini, tentunya diperlukan suatu perantara yang mencakup semua elemen masyarakat dan diakui sebagai kebenaran tunggal dan tentunya harus mudah diakses, tak lain pelantara tersebut adalah adanya media massa. Media massa merupakan bentuk perantara atau alat-alat yang digunakan oleh massa (kelompok atau kumpulan) orang dalam hubungannya satu sama lain. Media massa dapat berwujud pada beragam jenis, di antaranya media cetak, seperti koran, majalah, surat kabar dan tabloid, kemudian electronic media seperti radio, televisi, dan film, sementara yang terakhir berwujud pada media siber.

Komunikasi massa pada hakikatnya ialah suatu transformasi sosial yang luas, yang menyangkut persoalan-persoalan manusia di bidang pendidikan, penerangan, perubahan sikap dan nilai-nilai serta masalah peninjauan kembali masalah hubungan antar manusia, adat istiadat, kebiasaan dan lain-lain yang menyangkut tingkah laku sosial (Kuswandi, 2008, hal. 34). Media massa adalah salah satu perantara yang dapat digunakan dalam menginformasikan kepada masyarakat Indonesia tentang realitas kemajemukan dan perbedaan yang dimilikinya, dengan media massa baik berupa media cetak, media elektronik dan media siber, masyarakat yang jauh sekalipun mampu mengetahui realitas kemajemukan yang ada di Indonesia ini, sebagai contohnya, realitas masyarakat Jawa dengan beragam karakteristik budaya dan multi agamanya mampu diketahui oleh masyarakat yang terdapat di Kalimantan, tanpa harus datang secara langsung ke pulau Jawa dan melakukan riset di Jawa, namun dengan hanya mengakses informasi melalui media siber, media elektronik, atau media cetak, masyarakat tersebut sudah mampu mengetahui realitas kemajemukan saudaranya di lain daerah.

Apapun bentuknya, media massa akan terus menerus berperan penting dalam kehidupan kita. Media massa dapat menjadi mata dan telinga bagi masyarakat, memberi masyarakat sarana untuk mengambil keputusan dan membentuk opini kolektif yang bisa digunakan untuk lebih memahami diri mereka sendiri dan merupakan salah satu sumber utama untuk mengembangkan nilai-nilai dalam masyarakat yang plural. Karena itulah, Indonesia sangat membutuhkan peran media yang mengedukasi masyarakat agar bangsa ini menjadi lebih beradab dan bermartabat. Kontribusi besar media sangat diharapkan terutama dalam pemberitaan yang berkaitan dengan persoalan-persoalan

agama dan etnis. Sebab, agama dan etnis masih menjadi faktor paling penting yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia.

Dalam perkembangan media massa, apapun dampak dari peran media massa, keberadaan media komunikasi ini menjadi suatu kebutuhan yang tidak bisa dilepaskan dari manusia. Media massa merupakan salah satu bentuk sarana komunikasi yang paling efektif dewasa ini di dalam mensosialisasikan dan mendesiminasikan berbagai informasi ke masyarakat banyak. Media massa (cetak dan elektronik) menjadi salah satu ujung tombak bagi percepatan penyebaran informasi bagi masyarakat, apalagi pada era globalisasi sekarang ini, ketika batasan-batasan dan hambatan-hambatan geografis, iklim/cuaca, dan lain-lain tidak menjadi penghalang berarti bagi tersebarnya informasi ke khalayak ramai (masyarakat). Keefektifan serta peranannya yang begitu hebat menjadikan media massa menjadi salah satu komponen penting bagi pembentukan kepribadian masyarakat, serta perilaku dan pengalaman kesadaran masyarakat. Oleh karena itu pulalah banyak kelompok masyarakat yang berupaya menjadikan media massa sebagai sarana propaganda ide, cita-cita, nilai dan norma yang mereka ingin bentuk/ciptakan. Tinggal bagaimana pemilik media massa untuk lebih bijaksana dalam menjalankan peran media massa secara nyata (Mas'udi, 2013).

Perolehan informasi melalui salah satu dari ketiga media massa di atas sebenarnya secara sadar terjadi suatu proses internalisasi. Secara etimologis internalisasi menunjukkan suatu proses. Sementara dalam kaidah Bahasa Indonesia, internalisasi mendapatkan akhiran "isasi" mempunyai definisi proses, atau sebagai penghayatan, pendalaman, penguasaan secara mendalam melalui binaan, bimbingan dan sebagainya (Kebudayaan, 1989, hal. 336). yang berlangsung melalui penyuluhan, penataran, dan sebagainya yang merupakan keyakinan dan kesadaran akan kebenaran suatu nilai yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku. Dalam pengertian psikologis, internalisasi mempunyai arti penyatuan sikap, atau penggabungan, standart tingkah laku, pendapat, dalam kepribadian. Freud meyakini bahwa super ego atau aspek moral kepribadian berasal dari internalisasi sikap-sikap orang tua (Caplin, 1993, hal. 256). Sementara itu menurut Hornsby, internalisasi merupakan: *something to make attitudes, feeling, beliefs, etc fully part of one's personality by absorbing them through repeated experience of or exposure to them* (Hornsby, 1995, hal. 624).

Berdasarkan pendapat tersebut berimplikasi bahwa proses internalisasi dapat mempengaruhi seseorang dalam bersikap, berperasaan, dan berkeyakinan, hal itu terjadi dari proses penerapan suatu pengalaman tindakan, atau ucapan yang berulang-ulang. Secara sederhana, menurut Teguh Suyitno proses internalisasi dibagi menjadi 6 (enam) tahapan penting: 1) diberi tahu, 2) memahami, 3) menerima, 4) melakukan, 5) membiasakan, dan 6) menjadi karakter (Suyitno, 2017). Dengan menggunakan logika yang sama teori internalisasi dalam konteks media massa dan pluralisme agama di Indonesia bisa dijelaskan sebagai berikut: bahwa media massa mempunyai peran dalam menginformasikan dan memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang realitas kemajemukan dan pluralisme agama di Indonesia, melalui media cetak, seperti koran, majalah, surat kabar dan tabloid kemudian media elektronik seperti radio, televisi, dan film, sementara yang terakhir berwujud pada media siber dan media elektronik.

Setelah proses pemberian informasi baik melalui media cetak, media elektronik maupun media siber, tentunya masyarakat mampu memahami tentang kemajemukan dan pluralisme agama yang ada, hingga pada tataran menerima. Sikap menerima ini adalah sebagai aktualisasi kephahaman terhadap realitas yang ada. Ketika terjadi sikap menerima maka sebagai masyarakat yang paham akan mengimplementasikan apa yang diketahuinya ke dalam setiap tindakannya, atau setidaknya mampu menjadi dasar dalam pengambilan keputusan saat memandang suatu kasus yang bersinggungan langsung dengan kemajemukan dan pluralisme agama di Indonesia. Implementasi dari nilai pluralisme ini ketika terus berjalan dalam tataran yang benar, maka akan berwujud pada habitus, ini artinya pengetahuan tentang kemajemukan dan pluralisme agama di Indonesia tidak hanya sekedar sebagai pengetahuan dasar namun lebih jauh lagi yakni masyarakat akan terbiasa yang pada puncaknya kebiasaan tersebut akan lahir menjadi sebuah karakter.

Signifikansi media massa memiliki peran dalam berbagai aspek kehidupan sudah tidak diragukan lagi baik yang berdampak positif maupun negatif, meskipun sering dipandang secara berbeda namun tidak ada yang menyangkal atas perannya yang signifikan dalam perubahan yang terjadi di masyarakat. Media massa adalah cerminan berbagai peristiwa yang ada di masyarakat dan dunia, yang merefleksikan apa adanya. Karenanya seringkali pengelola media merasa tidak “bersalah” jika isi media dipenuhi

oleh konflik, kekerasan, pornografi dan berbagai keburukan lainnya, kerana menurutnya realitas yang terjadi adalah demikian faktanya. Sejatinya media massa, diharapkan mampu berperan dalam upaya turut merekonstruksi kondisi masyarakat kearah yang lebih baik bukan sebaliknya

Simpulan

Kontribusi media massa bukan hanya sabagai sarana hiburan saja, namun isi dan informasi yang disajikan mempunyai peran yang signifikan dalam proses sosial. Televisi merupakan salah satu media massa elektronik yang bersifat *audio visual*. Isi media massa televisi merupakan konsumsi otak bagi khalayak, sehingga sesuatu yang ada di televisi akan mempengaruhi pelaku interaksi sosial. Informasi yang tidak baik dari televisi akan memunculkan efek yang tidak baik pula terhadap objek sosial itu. Sehingga televisi dituntut untuk menyampaikan informasi secara akurat dan berkualitas. Media massa dalam peranannya mempunyai dua kecenderungan, 1) berpotensi konflik, dan 2) menciptakan keharmonisan dan kesadaran pluralistik agama. Media massa dianggap sebagai proses internalisasi yang secara logika mempunyai peran untuk menginformasikan dan memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang realitas kemajemukan dan pluralisme agama di Indonesia. Dalam masyarakat plural, media massa memegang peranan penting dalam menciptakan kondisi damai. Kontribusi media haruslah diarahkan kepada mempertimbangkan kepentingan masyarakat dalam menciptakan kondisi damai, jika informasi atau berita yang disajikan kepada masyarakat ini bersifat objektif dan jujur, maka dapat dimungkinkan dapat memberikan nilai positif bagi masyarakat. Informasi atau berita yang benar akan membuat peran media massa menjadi positif di mata masyarakat. Dengan memperhatikan nilai aktualitas suatu berita dan informasi yang disajikan dapat memberikan kejujuran dan pendidikan di tengah masyarakat yang berbudaya.

Referensi

- Abdullah, A. (2016). *Harmonisasi Hubungan antar Umat Beragama: Peran Tokoh Agama dan Politik dalam Membangun Kerukunan Umat Beragama. Harmonisasi Umat Beragama*. Kudus,.
- Abdullah, M. A. (2015). Sosiologi Dialog Antar Umat Beragama dalam Kemajemukan Negara-Bangsa. In *Bunga Rampai sosiologi Agama: Teori, Metode dan Ranah Studi Ilmu Sosiologi Agama* (hal. 107–113). Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Agus, Sudiby, Hamad, I., & Qodari, M. (2001). *Kabar-kabar Kebencian. Prasangka Agama di Media Massa*. Jakarta: ISAI.
- Asyri, Y. (2010). *Menelusuri Kearifan Lokal di Bumi Nusantara melalui Dialog Pengembangan Multikultural antar Pemuka Agama Pusat dan Daerah di Provinsi Maluku Utara, Papua, dan Maluku*. Jakarta: Maloho Jaya Abadi Press.
- Bungin, B. (2013). *Sosiologi Komunikasi*. Jakarta: Prenada Media.
- Burhanuddin, Y. M. (2008). *Bali yang Hilang: Pendatang, Islam dan Etnisitas di Bali*. Yogyakarta: Kanisius.
- Cangara, H. (2002). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Caplin, J. (1993). *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Durkheim, E. (1995). *The Elementary Forms of Religious Life*. London: The Free Press.
- El Ma'hady, M. (2008). *Multikulturalisme dan Pendidikan Multikultural*.
- Eliade, M. (1987). *Encyclopaedia of Religion* (12 ed.). Italy: MacMillan Publishing Company.
- Fakhruroji, M. (2017). *Dakwah di Era Media Baru*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Freedman, D. (2008). *The Politics of Media Policy*. Cambridge: Polity Press.
- Ghazali, A. M. (2009). *Argumen Pluralisme Agama Membangun Toleransi Berbasis Al-Qur'an*. Depok: KataKita.
- Hornsby, A. S. (1995). *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English Firth Edition*. Oxford: Oxford University.
- Ju'subaidi. (2016). Paradigma Pendidikan Agama Dalam Masyarakat Plural. *Jurnal*

- Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*, 20(2).
- Kebudayaan, D. P. dan. (1989). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kuswandi, W. (2008). *Komunikasi Massa: Sebuah Isi Media Televisi*. Jakarta: Rhineka Cipta.
- Madjid, N. (1995). *Islam Agama Peradaban, Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah*. Jakarta: Paramadina.
- Mas'udi. (2013). Peran Media dalam Membentuk Sosio-Kultural Agama masyarakat (Menggagas Prinsip-prinsip Etis dalam Jurnalistik). *Al Tabsyir*, 1(Komunikasi Penyiaran Islam).
- Nasional, P. B. D. P. (2008). *Tesaurus Bahasa Indonesia Pusta Bahasa*. Jakarta: Departemen Pendidikan.
- Nuswantoro, R. (2013). Media Massa dalam Situasi Konflik: dari Banwagon Effect samapi Peace Narrative. *Komunikasi*, 1(Media dan Masyarakat).
- Rachman, B. M. (2001). *Islam Pluralis, Wacana Kesetaraan Kaum Beriman*. Jakarta: Paramadina.
- Rasjidi, M. (2017). *Strategi Pencegahan Radikalisme Berbasis Agama di Perguruan Tinggi*. Semarang, Indonesia.
- Shihab, M. Q. (1999). *Membumikan Al Qur'an "Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat."* Bandung: Mizan.
- Sobur, A. (2009). *Analisis Teks Media*. Bandung: Rosdakarya.
- Statistik, B. P. (2010). Sensus Penduduk Indonesia 2010.
- Sumbulah, U., & Nurjanah. (2013). *Pluralisme Agama; Makna dan Lokalitas Pola Kerukunan Antarumat Beragama*. Malang: UIN Maliki Press.
- Suyitno, T. (2017). *Workshop Implementasi Kurikulum 2013*. Jepara.
- Taher, T. (2004). *Meredam Gelombang Radikalisme*. Jakarta: Karsa Rezeki.
- Turow, J. (2009). *Media Today: an Introduction to Mass Communication*. London: Routledge.
- Watson, J. (1996). *Media Communication an Introduction to Theory and Process*. London: Macmillan Press.